

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Ardyanto, Donny, 2002, *Korupsi di sektor pelayanan Publik dalam*
- Basyaib, H., dkk. (ed.) 2002, *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang.
- Baswir Revrison, 1993, *Ekonomi, Manusia dan Etika*, Kumpulan Esai-esai Terpilih, BPF, Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. Erni Widhayant, 1988, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Fadjar, Mukti, 2002, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam* pengantar Kurniawan, L, 2002, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans Malang.
- G. W. Bawengan, 1989, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanya jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Klitgaard, dkk 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Romli, Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta.
- R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Masih Ditakuti, Belum Ditaati*, Edisi 383 Oktober 2006 Warta Bea Cukai.
- Etika Dalam Fraud Audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Edisi Lima, Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*2004. Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1- 5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.

Reformasi Perpajakan dan Peranan BPKP Dalam Sistem Pengawasan, Menyongsong Indonesia Baru Tahun 2000, kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

<http://www.bpkp.go.id/> Unit / Pusat / Korupsi Tanggung Jawab Siapa. Pdf, 21 september 2007.

<http://www.bpkp.go.id>

Pedoman Kerja Reserse Kriminil, Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminil, Jakarta, 1971.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2011, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum P